



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GHOTAMA AIRLANGGA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 135522

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **869.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/66 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 700 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000
4. Tanah Seluas 1.000 m² di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **106.300.000**

1. LAINNYA, WIM CYCLE SEPEDA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 300.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2010, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000
3. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000
4. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



6. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
7. LAINNYA, SELIS SEPEDA LISTRIK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
8. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
9. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	840.390.347
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	723.656.508
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	61.881.177
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.601.228.032
III. HUTANG	Rp.	16.625.666
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.584.602.366

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.